

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bantul

1. Sejarah

Tentang sejarah Kabupaten Bantul memang tak bisa dilepaskan dari sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya. Bantul menyimpan banyak kisah kepahlawanan. Antara lain, perlawanan Pangeran Mangkubumi di Ambar Ketawang dan upaya pertahanan Sultan Agung di Pleret, serta Perjuangan Pangeran Diponegoro di Selarong. Kisah perjuangan pioner penerbangan Indonesia yaitu Adi Sucipto, pesawat yang ditumpanginya jatuh ditembak Belanda di Desa Ngoto. Sebuah peristiwa yang penting dicatat adalah Perang Gerilya melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman (1948) yang banyak bergerak di sekitar wilayah Bantul. Wilayah ini pula yang menjadi basis, "Serangan Oemoem 1 Maret" (1949) yang dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Tolok awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung

Kidul. Kontrak kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif.

Tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerjasama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Deggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 sapar tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya di kenal bernama Bantulkarang. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul.

Tanggal 20 Juli ini lah yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada Usamu Seirei nomor 13 sedangkan stadsgemente ordonantie dihapus. Kabupaten Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom).

Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah Nomor 22 tahun 1948. dan selanjutnya mengacu Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 yang isinya pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia.

Seiring dengan perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan silih bergantinya kepemimpinan nasional, kini ini Kabupaten Bantul telah mengalami kemajuan pesat diberbagai bidang dibawah kepemimpinan Hj. Sri Suryawidati yang menjabat sejak akhir tahun 2010.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul ditetapkan visi daerah, yaitu : "BANTUL PROJOTAMANSARI SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN AGAMIS".

Visa tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan dimasa yang akan datang adalah Bantul yang produktif profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis, yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi.

Produktif dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya dapat berproduksi sehingga mampu memberikan andil terhadap pembangunan daerah.

Profesional dalam arti penekanan kepada setiap warganya dari berbagai profesi, agar mereka betul-betul matang dan ahli di bidangnya masing-masing. Tolak ukur profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan kepada efisiensi penggunaan dana, sarana, tenaga serta waktu yang diperlukan.

Ijo Royo-Royo dalam arti tidak ada sejengkal tanah pun yang ditelantarkan sehingga baik di musim hujan baik di musim kemarau dimanapun akan tampak suasana yang rindang. Dalam hal ini perlu diingatkan kepada masyarakat Bantul bahwa bagaimana pun Kabupaten Bantul tumbuh terlebih dahulu sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka mendukung tumbuh berkembangnya sektor industri yang kuat di masa mendatang.

Tertib dalam arti bahwa setiap warga negara secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintah dan kemasyarakatan yang tertib semuanya secara pasti, berpedoman pada sistem ketentuan hukum/ perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya disiplin nasional.

Aman dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan

dan ketentraman masyarakat. Kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.

Sehat dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat/ manusia yang menghuninya.

Asri dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa dan di kota dapat serasi, selaras, dan seimbang dengan kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya sehingga akan menumbuhkan perasaan kerasan, asri tidak mewah tetapi lebih cenderung memanfaatkan potensi lingkungan yang berstandar pada kreativitas manusiawi.

Sejahtera dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Bantul telah terpenuhi secara lahir dan batin.

Demokratis dalam arti bahwa adanya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat, dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggungjawab.

Agamis dalam arti bahwa kehidupan masyarakat Bantul senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiusitas dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama tidak diartikan sebagai bentuk primordialisme untuk suatu agama tertentu, tetapi harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat ditentukan dalam interaksi sosial sehari-hari.

b. Misi

- 1) Mewujudkan kesejahteraan dengan prioritas mencerdaskan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang didasarkan kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.
- 2) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bertanggungjawab.
- 3) Mewujudkan demokratisasi dalam segala aspek kehidupan, menghormati hak asasi manusia, dan menjamin tegaknya supremasi hukum.
- 4) Mewujudkan peningkatan produksi, produktivitas, dan nilai tambah hasil-hasil potensi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3. Bentuk dan Lambang Daerah

Bentuk dasar lambang daerah Kabupaten Bantul adalah Ellipse (bulat panjang) yang merupakan gabungan Teratai Berkelopak Lima. Di bawah lukisan bentuk dasar terdapat gambar pita bertuliskan "KABUPATEN BANTUL". Di dalam bentuk Ellipse (bulat panjang) yang merupakan bunga Teratai Berkelopak Lima berisi lukisan yang menggambarkan Keadaan Alam, Kekayaan Alam, Latar Belakang Sejarah, Semangat dan Cita-cita, Persatuan/kesatuan, Ukuran Lambang Daerah garis tengah Horizontal 30 dan garis tengah Vertikal 40. Arti dan makna lambang daerah :

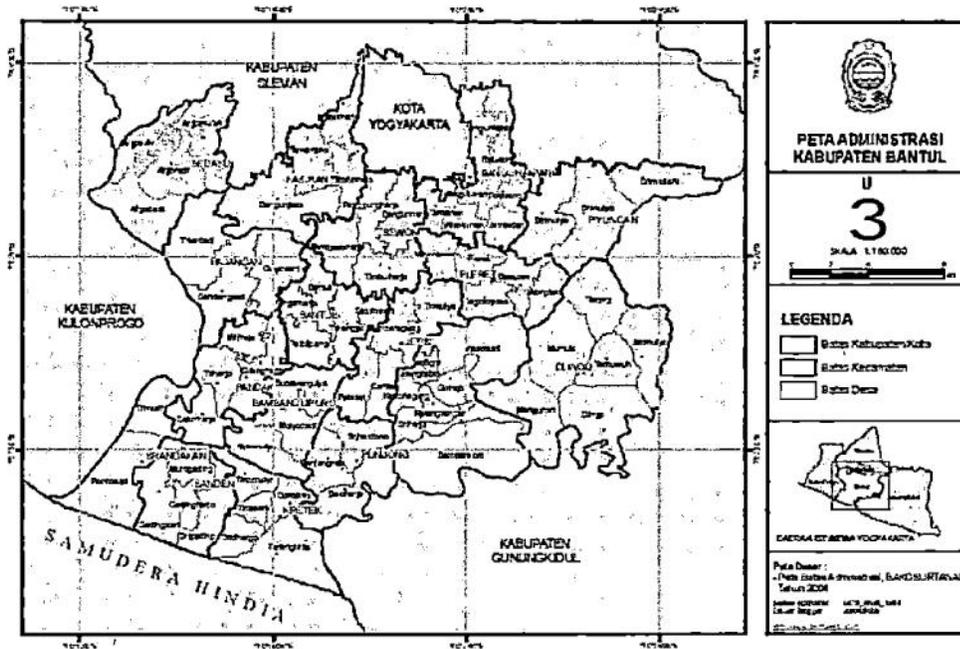
- a. Landasan Idiil Pancasila
- b. Gambar Bintang Emas bersegi lima menggambarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Gambar Pohon Kelapa menggambarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.
- d. Lukisan Dalam Warna Merah, Putih dari Roda Bergerigi menggambarkan Persatuan Indonesia.
- e. Lukisan Dalam Gambar Sungai menggambarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- f. Lukisan Dalam Gambar Padi dan Kapas menggambarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- g. Landasan Struktural Undang-Undang Dasar 1945 dilukiskan dalam gambar Ukiran Persegi (linggir Jawa) Empat dan Keris Berlekuk (luk Jawa) Lima.
- h. Tata kehidupan gotong royong kearah ketentraman dan kemakmuran dilukiskan dalam tulisan huruf Jawa berbunyi "HAMAMAYU HAYUNING BAWONO". Nilai-nilai Keagamaan dilukiskan dalam gambar Bintang Emas bersegi lima.
- i. Semangat perjuangan dan kepahlawanan dilukiskan dalam gambar Keris dan Gunung yang mengingatkan perjuangan Pahlawan Nasional Pangeran Diponegoro yang bermarkas di Gua Selarong pada waktu melawan penjajah Belanda.

- j. Semangat Pembangunan dilukiskan dalam gambar Roda Bergerigi dan untuk mencapai kemakmuran perlu dibangun industri-industri.

B. Kondisi Geografis

Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari lima daerah kabupaten atau kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila dilihat bentang alamnya secara makro, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara $07^{\circ}44'44''$ - $08^{\circ}00'27''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}12'34''$ - $110^{\circ}31'08''$ Bujur Timur. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul, di sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, dan di sebelah selatan berbatasan dengan samudera Indonesia.

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Bantul



C. Kondisi Demografi

1. Kepadatan Penduduk Geografis

Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah.

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan letak geografis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Kepadatan Penduduk

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah penduduk		
			2007	2008	2009
1.	Srandakan	18.340	31,133	31,240	31,322
2.	Sanden	23.270	34,352	34,513	36,370
3.	Kretek	25.500	31,704	31,980	32,161
4.	Pundong	23.760	32,501	32,690	32,887
5.	Bb.lipuro	22.820	43,996	44,368	44,629
6.	Pandak	24.290	49,993	50,892	51,256
7.	Bantul	33.190	60,799	61,623	62,013
8.	Jetis	21.990	51,083	51,693	51,969
9.	Imogiri	25.600	58,482	59,087	61,290
10.	Dlingo	57.810	38,096	38,402	42,130
11.	Pleret	56.340	34,600	41,389	41,848
12.	Piyungan	21.280	38,911	39,759	40,621
13.	Banguntapan	33.120	88,236	89,667	90,477
14.	Sewon	26.290	79,382	80,561	81,151
15.	Kasih	26.760	81,193	89,800	91,849
16.	Pajangan	32.380	31,644	31,996	33,079
17.	Sedayu	34.110	45,787	46,546	46,784
Jumlah		506.850	833,962	856,206	871,836

Sumber: BPS Kabupaten Bantul

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kecamatan yang memiliki luas wilayah paling luas dibandingkan kecamatan lainnya adalah kecamatan Dlingo dengan luas wilayah 57.810 Km² dan kecamatan yang mempunyai luas wilayah paling sempit adalah Kecamatan Srandakan dengan luas wilayah 18.340 Km². Jumlah penduduk dari tahun 2007, 2008, dan 2009 mengalami peningkatan pada sebagian besar kecamatan kecuali kecamatan Pundong yang mengalami penurunan yaitu dari 33,105 menjadi 32,501. Demikian juga pada kepadatan penduduk, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Bantul setiap tahunnya mengalami peningkatan kecuali pada kecamatan Pundong 1393,31 Km² menjadi 1370,41 Km² dan Pandak 2009,92 Km² menjadi 2007,87 Km².

2. Golongan umur

Kepadatan penduduk golongan umur adalah jumlah penduduk berdasarkan golongan umur pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk golongan umur menunjukkan penyebaran penduduk berdasarkan kelompok umur dan tingkat kepadatannya di suatu daerah.

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan golongan umur tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Umur

No	Kecamatan	GOLONGAN UMUR				Jumlah
		0-9	10-19	20-39	40 ke atas	
1.	Bambanglipuro	7,838	8,681	12,490	13,805	42,814
2.	Banguntapan	11,868	18,983	27,762	22,066	80,679
3.	Bantul	9,058	10,269	19,910	20,188	59,425
4.	Dlingo	6,323	6,057	12,585	12,314	37,279
5.	Imogiri	9,235	10,449	17,989	19,416	57,089
6.	Jetis	9,743	9,110	17,092	20,373	56,318
7.	Kasihan	13,058	14,485	29,420	22,783	79,746
8.	Kretek	4,193	4,347	11,168	11,668	31,376
9.	Pajangan	5,791	5,327	10,482	8,989	30,589
10.	Pandak	7,450	8,433	15,766	17,245	48,894
11.	Piyungan	9,539	9,065	9,852	9,778	38,234
12.	Pleret	5,620	8,251	11,953	8,222	34,036
13.	Pundong	4,260	4,956	13,847	11,577	34,640
14.	Sanden	5,390	7,061	9,612	12,141	34,204
15.	Sedayu	7,093	7,739	15,367	14,757	44,956
16.	Sewon	10,963	14,392	29,370	22,145	76,870
17.	Srandakan	4,645	5,613	9,236	11,404	30,898
Jumlah		132,057	153,218	73,901	258,871	818,047

Sumber: BPS dan Tata Pemerintahan (Tahun 2009)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada golongan umur 0-9 tahun Kecamatan Kasihan merupakan kecamatan dengan jumlah terbesar yaitu 13,053 dan Kecamatan Kretek dengan jumlah terkecil yaitu 4,193. Untuk golongan umur 10-19 tahun Kecamatan Banguntapan sebagai kecamatan dengan jumlah terbesar yaitu 18,983 dan Kecamatan Pundong dengan jumlah terkecil yaitu 4,956. Untuk golongan umur 20-39 tahun kecamatan Kasihan sebagai kecamatan dengan jumlah terbesar yaitu 29,420 dan Kecamatan Srandakan dengan jumlah terkecil yaitu 9,236.

Untuk golongan umur 40 tahun ke atas kembali Kecamatan Kasihan sebagai kecamatan dengan jumlah terbesar yaitu 22,783 dan Kecamatan Pleret dengan jumlah terkecil yaitu 8,222. Dari keseluruhan golongan umur Kecamatan Banguntapan merupakan kecamatan dengan jumlah terbesar yaitu 80,679. Dan dari keseluruhan golongan umur bahwa golongan umur 20-29 tahun merupakan golongan umur dengan jumlah paling banyak yaitu 273,901.

3. Jenis Kelamin

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan.

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan jenis kelamin tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat pada table 2.3, 2.3. dan 2.4 berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Pada Tahun 2007

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Th. 2007		
		Pria	Wanita	Jumlah
1.	Srandakan	15,157	15,976	31,133
2.	Sanden	16,674	17,678	34,352
3.	Kretek	15,226	16,478	31,704
4.	Pundong	15,746	16,815	32,561
5.	Bb.lipuro	21,249	22,747	43,996
6.	Pandak	24,795	25,201	49,996
7.	Bantul	29,749	31,050	60,799
8.	Jetis	24,851	26,232	51,083
9.	Imogiri	28,532	29,950	58,482
10.	Dlingo	18,873	19,623	38,096
11.	Pleret	17,281	17,319	34,600
12.	Piyungan	19,154	19,757	38,911
13.	Banguntapan	43,432	44,804	88,236
14.	Sewon	40,188	39,194	79,382
15.	Kasihani	40,554	40,639	81,193
16.	Pajangan	15,498	16,146	31,614
17.	Sedayu	22,431	23,356	45,787
Jumlah		408,990	422,965	831,955

Sumber: BPS Kabupaten Bantul

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Pada Tahun 2008

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Th. 2008		
		Pria	Wanita	Jumlah
1.	Srandakan	15,194	16,046	31,240
2.	Sanden	16,744	17,769	34,513
3.	Kretek	15,358	16,662	31,980
4.	Pundong	15,823	16,867	32,690
5.	Bb.lipuro	21,449	22,919	44,368
6.	Pandak	25,184	25,708	50,892
7.	Bantul	30,153	31,470	61,623
8.	Jetis	25,142	26,551	51,693
9.	Imogiri	28,871	30,216	59,087
10.	Dlingo	18,632	19,770	38,402
11.	Pleret	20,243	21,146	41,389
12.	Piyungan	19,553	20,206	39,759
13.	Banguntapan	44,193	45,474	89,667
14.	Sewon	40,846	39,715	80,561
15.	Kasih	44,629	45,171	89,800
16.	Pajangan	15,669	16,327	31,996
17.	Sedayu	22,784	23,762	46,546
Jumlah		420,467	435,739	856,206

Sumber: BPS Kabupaten Bantul

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Pada Tahun 2009

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Th. 2009		
		Pria	Wanita	Jumlah
1.	Srandakan	15,231	16,091	31,322
2.	Sanden	17,922	18,448	36,370
3.	Kretek	15,431	16,730	32,161
4.	Pundong	15,949	16,938	32,887
5.	Bb.lipuro	21,578	23,051	44,629
6.	Pandak	25,352	25,904	51,256
7.	Bantul	30,352	31,661	62,013
8.	Jetis	25,272	26,697	51,256
9.	Imogiri	30,133	31,157	61,290
10.	Dlingo	20,868	21,262	42,130
11.	Pleret	20,459	21,389	41,848
12.	Piyungan	19,970	20,651	40,621
13.	Banguntapan	44,616	45,861	90,477
14.	Sewon	41,168	39,983	81,151
15.	Kasih	45,861	45,988	91,849
16.	Pajangan	16,250	16,829	33,079
17.	Sedayu	22,962	23,822	46,784
	Jumlah	429,372	442,462	871,836

Sumber: BPS Kabupaten Bantul

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2007 jumlah perempuan yaitu 422,965 lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki yaitu 408,990. Dan pada tahun 2008 jumlah perempuan juga lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki yaitu 435,739 untuk perempuan dan 420,467 untuk laki-laki. Dan pada tahun 2009 juga demikian yaitu jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki yaitu 442,462 untuk perempuan, dan 429,372 untuk laki-laki. Dari tahun 2007 ke 2009 baik jumlah laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan.

4. Mata Pencaharian

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan mata pencaharian, terdiri dari penduduk yang bermatapencaharian pada bidang pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, listrik, gas, dan air, konstruksi, perdagangan, komunikasi/transportasi, keuangan dan jasa lainnya.

Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan di Kabupaten Bantul tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6 :**Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Lapangan Pekaerjaan	Tahun	
		2007	2008
1	Pertanian	-	179
2	Pertambangan dan penggalian	-	-
3	Industri	3,338	19,20
4	Listrik, gas dan air	492	299
5	Konstruksi	-	1,241
6	Perdagangan	-	3,511
7	Komunikasi/transportaasi	-	231
8	Keuangan	-	998
9	Jasa Keemasyarakatan, Sosial dan Perseorangan	142	5,261
	Jumlah	3,972	30,90

Sumber : BPS Kabupaten

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2007 dan tahun 2008 mata pencaharian yang mendominasi sebagian besar penduduk Kabupaten Bantul yaitu industri.

Sedangkan tenaga kerja sektor perdagangan dapat dilihat pada tabel

2.7 berikut :

Tabel 2.7
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perdagangan Tahun
2002-2008

No	Tahun	Tenaga Kerja Pedagang Formal	Tenaga Kerja Pedagang informal	Jumlah
1.	2002	22.470	9.601	32.071
2.	2003	24.953	9.919	34.872
3.	2004	27.827	11.375	39.202
4.	2005	30.372	11.191	41.563
5.	2006	33.395	11.560	44.955
6.	2007	35.816	11.615	47.431
7.	2008	36.617	11.735	48.352

Sumber : Disnakertrans Bantul

5. Pendidikan

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan tingkat pendidikan yaitu penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah, tidak atau belum tamat SD, sekolah sampai dengan tingkat SD, SLTP, SLTA, DI/ DII, Akademi/ D3, D4 – S3.

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8

Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	2006	2007	2008
SD	315	70	46
SLTP	991	420	366
SLTA UMUM	285	2.205	3.184
SLTA KEJURUAN	915	2.219	2.903
DIPLOMA I, II	307	268	404
SARJANA MUDA/DIPLOMA III	647	810	1.960
DIPLOMA IV	-	-	-
SARJANA/S-1	3.985	2.916	5.856
S-2-S-3	26	61	67
Jumlah	7.471	9.041	14.786

Sumber: BPS Kabupaten Bantul

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 penduduk menempati angka tertinggi yaitu 14.786, ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2007 masih tergolong rendah pada tahun itu. Sedangkan pada tahun 2008 sarjana S-1 menempati angka tertinggi yaitu 5.856. Dan terlihat dari tahun 2006,2007 dan 2008 tingkat pendidikan berdasarkan tingkat SD mengalami penurunan angka yang berarti bahwa kesadaran untuk sekolah meningkat.

D. Pemerintah Daerah

Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75 desa dan 933 padukuhan. Jumlah kecamatan, desa dan padukuhan di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.9

Jumlah Kecamatan, Desa dan Padukuhan di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Padukuhan	Luas (Km ²)
1.	Srandakan	2	43	18,32
2.	Sanden	4	62	23,16
3.	Kretek	5	52	26,77
4.	Pundong	3	49	24,30
5.	Bambanglipuro	3	45	22,70
6.	Pandak	4	49	24,30
7.	Pajangan	3	55	33,25
8.	Bantul	5	50	21,95
9.	Jetis	4	64	21,47
10.	Imogiri	8	72	54,49
11.	Dlingo	6	58	55,87
12.	Banguntapan	8	57	28,48
13.	Pleret	5	47	22,97
14.	Piyungan	3	60	32,54
15.	Sewon	4	63	27,16
16.	kasihan	4	53	32,38
17.	Sedayu	4	54	34,36
Jumlah		75	933	506,85

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kecamatan Dlingo mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 Km². Sedangkan jumlah desa dan pedukuhan yang terbanyak terdapat di Kecamatan Imogiri dengan delapan desa dan 72 pedukuhan.

Struktur organisasi kabupaten Bantul terdiri dari 13 Sekretariat Daerah, 3 BUMD, 6 bank, 5 BUMN, 7 Kantor, 3 badan, 14 Dinas, dan 17 Kantor Kecamatan.

E. Profil Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Pembentukan struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah.

1. Sekretariat daerah

Sekretariat daerah merupakan perangkat daerah pemerintah Kabupaten Bantul sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya dituangkan secara konkrit dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

2. Sekretariat DPRD

Anggota DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2008 sebanyak 45% orang berasal dari 6 fraksi, yaitu fraksi PDIP (16 orang), Fraksi PAN (7 orang), Fraksi PKB (6 orang), Fraksi Golongan Karya (5 orang) , fraksi

PKS (5 orang), dan Fraksi Kesatuan Baru (6 orang). Dari 45 orang anggota Dewan tersebut, 3 orang diantaranya sebagai Pimpinan Dewan lainnya terbagi dalam 4 komisi, yang terdiri dari :

- a. Komisi A (Pemerintahan) : 12 orang
- b. Komisi B (Perekonomian) : 10 orang
- c. Komisi C (Keuangan) : 8 orang
- d. Komisi D (Pembangunan) : 12 orang

3. Dinas-dinas Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009, terdapat 15 Dinas Daerah yang berada di Lingkungan Kabupaten Bantul, yaitu :

- a. Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal
- b. Dinas Pendidikan Dasar
- c. Dinas Kesehatan
- d. Dinas Sosial
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- f. Dinas Perhubungan
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- i. Dinas Pekerjaan Umum
- j. Dinas Sumber Daya Air
- k. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
- l. Dinas Pertanian dan Kehutanan
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan

- n. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- o. Dinas Perijinan

4. Lembaga Teknis Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul terdapat 13 Lembaga Teknis Daerah :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Badan Lingkungan Hidup
- c. Badan Kepegawaian Daerah
- d. Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan KB
- e. Inspektorat
- f. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati
- g. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa
- h. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
- i. Kantor Perpustakaan Umum
- j. Kantor Arsip
- k. Kantor Pengelolaan Pasar
- l. Kantor Pengelolaan Data Telematika
- m. Kantor Pemuda dan Olahraga.

G. Profil Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul

Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul, saat ini diberikan tanggungjawab untuk mengelola sebanyak 29 pasar tradisional, yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Untuk melihat secara dekat keadaan dan komposisi personal maupun sarana dan prasarana yang ada dan dikelola oleh Kantor, maka dapat disampaikan seperti berikut :

1. Kedudukan

Kantor Pengelolaan Pasar merupakan pendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Sesuai dengan pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul , tugas pokok Kantor Pengelolaan Pasar yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengelolaan pasar.

Adapun secara jelas untuk masing-masing memiliki rincian tugas, antara lain sebagai berikut :

a. Kepala Kantor bertugas :

- 1) Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.
- 2) Melakukan kordinasi dalam menyusun rancangan usulan program kerja tahunan baik rutin maupun proyek semua unit kerja di lingkungan Kantor Pengelolaan Pasar.
- 3) Melaksanaakan pengelolaan anggaran, administrasi keuangan, pembukuan dan perbendaharaan serta membuat laporan pertanggungjawaban.
- 4) Melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi penyiapan pengangkatan pegawai, usul mutasi pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberhentian, pensiun, cuti pegawai, dan kesejahteraan pegawai serta urusan kepegawaian lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Mengurus gaji, SPP gaji dan pembayaran gaji.
- 6) Mengurus penyediaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang-barang untuk keperluan kantor.
- 7) Mengurus penggunaan, pemeliharaan dan perawatan barang inventaris, gedung, peralatan, kendaraan dan sejenisnya.

- 8) Mengurus kerumahtanggaan, melaksanakan hubungan masyarakat, kebersihan, keamanan dan keindahan lingkungan Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul.
 - 9) Melaksanakan pengaturan alokasi penggunaan ruang kerja, ruang rapat, dan ruang lainnya serta menyediakan tempat dan akomodasi untuk keperluan rapat-rapat atau pertemuan sesuai kebutuhan dan dana yang tersedia.
 - 10) Melaksanakan urusan surat-menyurat yang meliputi surat masuk dan keluar, kearsipan, ekspedisi, serta dokumentasi.
 - 11) Membantu menyiapkan bahan untuk laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pelaksanaan program kerja serta laporan-laporan lainnya.
 - 12) Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul mengenai tindakan atau langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.
 - 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
 - 14) Membuat laporan kepada atasan mengenai tugas yang telah dilaksanakan.
- c. Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas :
- 1) Menyelenggarakan, mengelola dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data, peyusunan program dan rencana strategis kantor.

- 2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis kantor.
 - 3) Melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan program pembangunan dan pemeliharaan pasar.
 - 4) Mengelola dan menyajikan data guna perumusan perencanaan tugas-tugas kantor.
 - 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala kantor sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Seksi Pendapatan mempunyai tugas :
- 1) Menyusun rencana kegiatan seksi pendapatan.
 - 2) Merumuskan kebijakan umum pengelolaan pendapatan pasar.
 - 3) Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan pasar.
 - 4) Melaksanakan pengelolaan pendapatan pasar.
 - 5) Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pasar.
 - 6) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pendapatan.
- e. Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
- 1) Menyusun rencana kegiatan seksi sarana dan prasarana.
 - 2) Merumuskan kebijakan umum dibidang pengelolaan sarana dan prasarana pasar.
 - 3) Merumuskan kebijakan teknis dibidang pengelolaan sarana dan prasarana pasar.
 - 4) Menyusun rencana oprasional pengelolaan sarana dan prasarana pasar.

- 5) Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar.
- 6) Melaksanakan pengelolaan data pedagang pasar.
- 7) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, kegiatan seksi sarana dan prasarana.

3. Fungsi

Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar;
- c. Pembinaan dan pengendalian pengelolaan pasar;
- d. Melaksanakan ketatausahaan Kantor; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai Kantor Pengelolaan Pasar adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Pasar yang bersih, indah dan rapi dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya dalam meningkatkan pendapatan.
- b. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berasaskan pada prinsip keadilan dan pemerataan.

- c. Meningkatkan Pendapatan Asli daerah dari hasil pengelolaan pasar, sehingga meningkatkan kemandirian dalam otonomi daerah.
- d. Menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok dengan manajemen distribusi barang yang merata.
- e. Menghindarkan Masyarakat Bantul dari jeratan rentenir dengan pemberian stimulus bantuan dana bergulir.

5. Sasaran

- a. Tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan meningkatkan PDRB Kabupaten Bantul.
- b. Terwujudnya ketertiban dalam pasar sesuai dengan zone peruntukan dan kerapihan dalam kawasan pasar.
- c. Terwujudnya jiwa kewirausahaan yang mandiri bagi para pedagang (UMKM).
- d. Tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran pada sektor informal.

H. Visi, Misi, dan Nilai-nilai Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten

Bantul

1. Visi

Terwujudnya Pasar Tradisional yang bersih, sehat, aman, nyaman, sejahtera dan bebas dari rentenir.

2. Misi

- a. Meningkatkan dukungan dan kualitas kelembagaan serta memantapkan pelaksanaan koordinasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang pengelolaan pasar melalui upaya optimalisasi penghimpunan dana dari pungutan retribusi pasar guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Meningkatkan pelayanan serta mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan pedagang pasar dengan kebijakan pemberian bantuan dana bergulir di pasar, sehingga terwujud konsep pasar yang bebas dari jerat rentenir sekaligus kesejahteraan masyarakat pedagang pasar meningkat.
- c. Mengupayakan terwujudnya basis data pasar yang simpel, akurat, realis dan terpercaya dengan mengoptimalkan pelayanan secara prima kepada semua pengguna pasar serta penyediaan sarana dan prasarana pasar menuju pasar yang bersih, sehat dan nyaman.

3. Nilai-nilai

Untuk mewujudkan dan mencapai visi misi dari Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul tersebut maka nilai utama yang menjadi landasan dan ukuran yang mengendung kebenaran apabila diterapkan secara konsekuen dan konsiten antara lain, seperti dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, yaitu :

a. Profesionalitas

Profesionalitas merupakan asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan tugas pokok dan fungsi dari SKPD maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pelaksanaan kegiatan sudah selayaknya apabila dilakukan dengan pendekatan yang mengutamakan segi profesional, terarah, dan strategis. Sebagai wujud profesionalitas yang harus ditunjukkan oleh Kantor Pengelolaan Pasar adalah bahwa setiap penentuan jenis kegiatan dan pelaksanaan di lapangan harus selalu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang harus dijunjung dan ditegakkan oleh seluruh aparat yang ada. Tolak ukur profesionalitas ini dapat dilihat secara nyata dari kualitas hasil kerja yang mendasarkan kepada efisiensi dalam penggunaan dana, sarana, tenaga serta waktu penyelesaian yang diperlukan.

b. Akuntabilitas

Pengertian dari akuntabilitas adalah adanya kewajiban bagi setiap aparat/petugas dari Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul untuk bertindak secara bertanggungjawab atas segala kebijakan yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan/kebijakan kantor, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Atau dengan kata lain bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh petugas maupun aparat, dapat

dipertanggungjawabkan di hadapan publik yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuatnya, apakah keputusan kebijakan itu akan bermanfaat bagi organisasinya sendiri ataupun dapat bermanfaat bagi masyarakat.

c. Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan arus informasi.

Masyarakat diberi kebebasan untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh serta berhak mengajukan tanggapan dan kritik terhadap kinerja Pemerintah Daerah yang dinilainya tidak memiliki sifat transparan ini. Berbagai proses kelembagaan dan informasi haruslah dapat diakses secara terbuka bagi semua yang membutuhkan, selain itu informasi yang disediakan oleh pemerintah hendaknya diberikan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi oleh setiap orang.

d. Pelayanan Prima

Kesadaran pemerintah untuk memahami bahwa kepercayaan masyarakat sangat menentukan kelangsungan hidup sebuah organisasi pemerintahan yang ada, dipengaruhi oleh kenyataan yang selama ini pelayanan yang dijalankan semakin hari semakin kurang efektif dan

efisien. Akibatnya tingkat kepercayaan masyarakat semakin rendah pula, bahkan pengaruh yang lebih buruk dari ketidakpercayaan kepada pemerintah telah menimbulkan kerugian dan kekacauan yang berkepanjangan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk itulah pelayanan merupakan hal yang utama menjadi perhatian bagi setiap stakeholder dalam melaksanakan kegiatan dan kebijakan dari masing-masing SKPD yang ada di Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan pelayanan prima ini, Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul telah berupaya memberikan kemudahan dan jempit bola terhadap kebijakan-kebijakan yang menyangkut masyarakat maupun pedagang pasar.

Antara lain dapat ditunjukkan dengan kegiatan pengurusan perijinan menempati kios los, dan ijin dasaran yang lainnya, petugas kantor yang ada di masing-masing pasar senantiasa membantu tanpa biaya tertentu, juga kebijakan pemberian pinjaman dan bergulir bagi pedagang yang bermodal kecil, sebagai antisipasi berkembangnya para rentenir.

e. Demokrasi

Pengertian demokrasi yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa setiap warga masyarakat diberikan kebebasan dalam mengemukakan pendapat maupun usulan, menjunjung tinggi perbedaan pendapat serta menerima masukan pendapat dari orang lain. Namun demikian apabila sudah terbentuk kesepakatan dan

menjadi keputusan bersama, harus dapat dilaksanakan secara bersama-sama penuh dengan rasa tanggungjawab.

Lewat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) komasariat tiap pasar, proses demokratisasi itu dapat dilaksanakan, karena secara bertahap Kantor Pengelolaan Pasar mengajak para pedagang untuk membentuk asosiasi ini.

f. Efektifitas dan efisiensi

Proses kegiatan dari sebuah lembaga, diharapkan akan menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Antara lain dengan cara pemanfaatan sumber daya yang ada sehemat dan secermat mungkin untuk menghasilkan sesuatu seperti yang telah disepakati bersama.

Kantor Pengelolaan Pasar telah berupaya melaksanakan hal ini dengan cara operasionalisasi setiap sumber daya yang ada baik sumber daya manusia, dana, maupaun material yang tersedia untuk mendapatkan hasil yang optimal dan semaksimal mungkin, terlebih juga harus tepat sasaran.

g. Supremasi Hukum yang dapat diterima oleh masyarakat

Prinsip ini mengandung arti bahwa pemerintahan yang baik haruslah mempunyai karakteristik berupa jaminan hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan yang menyangkut Publik dan menjadi operasional pelayanan publik. Kerangka aturan hukum perundang-undangan yang berlaku haruslah memiliki rasa

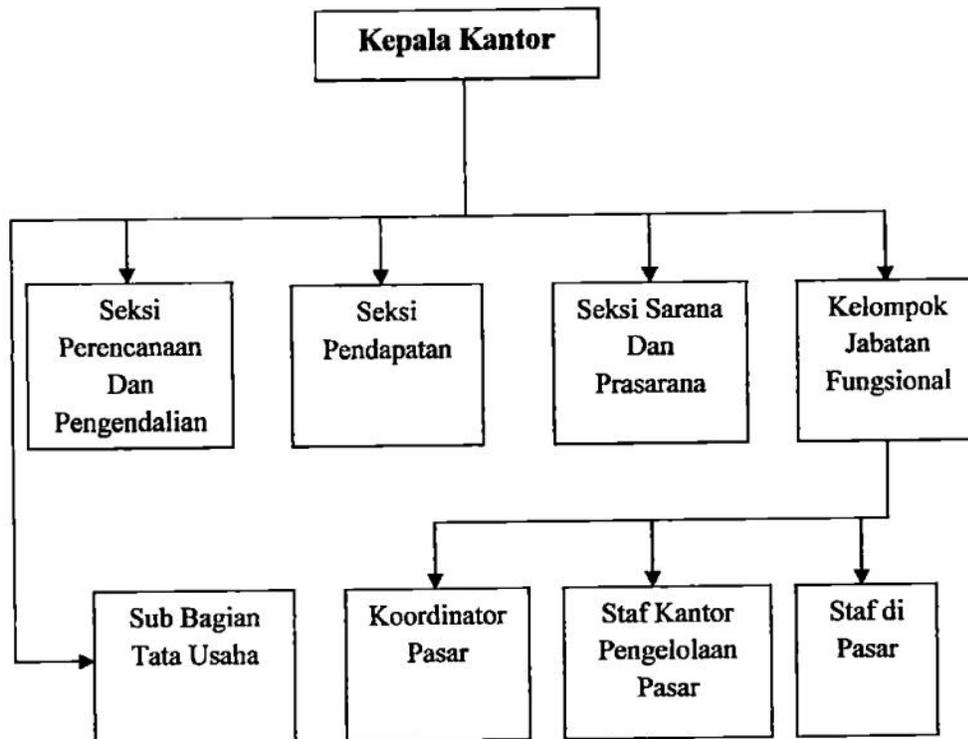
keadilan dan ditegakkan serta dipatuhi secara utuh, apalagi aturan hukum tersebut menyangkut tentang hak-hak asasi manusia.

I. Struktur Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul

Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar, dapat dilihat pada gambar 2.2 sebagai berikut :

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul



J. Sarana dan Prasarana Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul

Sehubungan dengan masih dalam proses berdiri sendiri sejak terpisah dari Dinas Pendapatan Daerah pada awal tahun 2009, maka kebanyakan aset dan sarana yang dimiliki oleh Kantor Pengelolaan Pasar adalah sebagian dari aset yang berasal dari sebagian Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul.

Dengan demikian sarana dan prasarana yang ada masih sangat terbatas dan belum mencukupi kebutuhan operasional dari Kantor Pengelolaan Pasar.

Sedangkan untuk sarana dan prasarana yang terdapat di seluruh pasar tradisional Kabupaten Bantul, antara lain adalah kios sebanyak 634 unit, los sebanyak 427 unit, Bango 641 unit, kantor/ruang kerja pasar sebanyak 44 buah, tempat pembuangan sampah sebanyak 26 unit, MCK sebanyak 42 unit, mushola sebanyak 13 unit, dan pedagang sebanyak 12.023 pedagang.